

**POLITIK BIG DATA DI ERA DISRUPSION (SKEMA KERJA LEMBAGA DATA
DALAM MENYEDIAKAN JASA BAGI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS
KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA)**

Michelia Erytrhina Nugraha

Mahasiswa program S1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email: michailnugraha@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how the politics of Big Data in the Yogyakarta City Health Office in providing services for public services. The results of the analysis of this study are based on the evaluation of several indicators of data management work schemes and data users, there are several problems that have made public services in the Yogyakarta City Health Office not yet evissient, this is due to data privacy and lack of data types in the services of the JSS (Jogja Smart Service) program. . Services are only related to checking room space at Yogyakarta City Hospital, whereas in the amount of data on the Big Data system which is 120 TB it cannot be maximized to become a variety of services. Conclusion of the use of Big Data at the Yogyakarta City Health Office related to public services is still not optimal due to the lack of diversity of data that is still one service only, that is checking the rooms of hospitals. In addition there are obstacles related to the lack of data provided by the Health Office and the lack of data availability, HR competencies, data privacy and supporting infrastructure. Suggestions for further research, a qualitative survey / measurement can be carried out on the maturity level of Big Data technology implementation using assessment instruments that have been developed by TDWI, in more government agencies. Thus, a more comprehensive picture is obtained about the implementation of Big Data technology in Indonesian government institutions, especially in Yogyakarta City.

Keywords: *Big Data, Public Services, Data Institutions.*

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik berkaitan dengan hal-hal yang berupa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun suatu instansi tertentu untuk memberikan kemudahan dan bantuan dalam suatu pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pelayanan publik selama ini berkaitan pada khalayak mempunyai berbagai macam suatu

kegiatan/agenda yang memiliki maksud dan tujuan. Pelayanan masyarakat di negara kita merupakan suatu yang layak untuk dibiayakan, karena disebabkan karena pelayanan masyarakat yang sedang berjalan bisa dikategorikan dengan predikat tak baik atau puas jika dipandang dari seluruh problem yang dialami suatu institusi ketika memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (2017) ditemukan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta meraih nilai kepatuhan tinggi, sedangkan daerah DIY dan lainnya masuk ke dalam zona kuning dalam hasil survei nasional Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik 2017. Nilai Pemda DIY 71,15, Gunungkidul 69,48, Kulonprogo 74,26, Sleman 67,33 dan Bantul 66,67 (Tribun Jogja, 2017).

Hasil pengamatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2013) yang menunjukkan bahwa indeks kepuasan konsumen mengenai pelayanan yang dilakukan instansi pusat yaitu dengan nilai 6,64, sedangkan tahun 2014 bahwa indeks kepuasan konsumen mengenai yang dilakukan di daerah yaitu dengan nilai 6,69. (Kairupan, 2015) berpendapat pelayanan kepada masyarakat yang baik apabila dikatakan bahwa tidaknya penyusunan, mempunyai SOP, pelayanan harus sesuai SOP yang ada, informasi yang berikan harus terbuka keterbukaan informasi, bersikap adil dan kecekatan memberikan pelayanan, serta memudahkan masyarakat yang mengadu kepada instansi tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan sangat diperlukannya suatu pemakaian big data agar dapat merumuskan suatu pengambilan keputusan. Pemakaian teknologi berbasis informasi dan komunikasi menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan/ekonomi, dan dapat memberikan masukan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan.

Big data bisa dipakai untuk perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, seperti yang dilakukan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk pengembangan sistem informasi air global (*Global Water Information System*). Pada negara Tiongkok, dipakai untuk mengetahui penyebaran kemiskinan dengan menggunakan *Call Data Records*. (BPN,2017), berpendapat bahwa pemanfaatan big data berguna untuk menentukan kebijakan, merumuskan kebijakan, dan pedoman dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Penerapan big data di Yogyakarta sudah digunakan untuk program Dinas kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Selain itu juga institusi-institusi pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) di Yogyakarta telah melakukan pemanfaatan analisa *big data* untuk membantu dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan jaminan kesehatan. Salah satunya seperti, mengurangi pelayanan pengadministrasian kembali pasien (*readmisi*) yang kerap menunggu terlalu lama yang terjadi di rumah sakit (Idris, 2018).

Sedangkan untuk permasalahan pelayanan publik di Yogyakarta terdapat instansi yang dinilai buruk dalam melakukan pelayanan publik yaitu pelayanan publik di Samsat Kota Yogyakarta (Sistim Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap). Seperti pada kasus di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditemukan tidak adanya informasi kepada calon pengguna layanan terkait masalah waktu dan tarif yang dikenakan dan untuk mendapatkan informasi tersebut calon pengguna diharuskan bertemu kepala seksi yang dapat menimbulkan masalah kolusi dan korupsi, banyaknya calo yang ditemukan di Samsat, dan ditemukannya penyalahgunaan jamkesmas (Lestari, 2015).

Pemakaian big data untuk pelayanan kesehatan di Yogyakarta dapat membantu rumah sakit untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan suatu perkiraan berapa jumlah per hari dan per jam yang berkunjung ke

rumah sakit tersebut. Selain itu big data mempunyai manfaat bagi perawat dan administrasi rumah sakit untuk dapat melatih dalam penggunaan dan pengeoperasian data.

Big data dapat dimanfaatkan oleh peneliti medis/kesehatan untuk membutuhkan sejumlah data yang besar pada rencana awal tingkat pemulihan sampai menemukan tingkat keberhasilan dan mempunyai peluang untuk menyembuhkan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Misalnya, big data dimanfaatkan untuk memeriksa sampel tumor di biobank yang di hubungkan dengan catatan perawatan pasien tersebut.

Sedangkan untuk permasalahan pelayanan data publik yang didapatkan dari Kemeninfo Kota Yogyakarta didapatkan bahwa kualitas pelayanan publik masih sangat rendah, hal ini terjadi disebabkan karena sistem pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta pada aplikasi *Jogja Smart Service* hanya terdapat info kamar saja yaitu pada rumah sakit RSUD Jogja sedangkan untuk instansi/dinas lainnya menggunakan *Jogja Smart Service* hanya sebagai wadah untuk pelayanan masyarakat secara mandiri.

Maka penelitian ini membahas tentang Politik Big Data di Era Disrupsi (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Kesehatan di Kota Yogyakarta), dan apakah big data di era disrupsi ini mampu membuat masalah-masalah yang ada menjadi lebih baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam model penelitian kualitatif deskriptif, yang mana ini menjadikan individu sebagai sumber data, yang harus dapat disesuaikan dengan situasi yang sesungguhnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Tylor dapat diartikan sebagai tahap dalam penelitian dengan mendapatkan data deskriptif yang berupa tulisan maupun lisan dari sumber data ketika dilakukan pengamatan (Moleong, 2014:3).

Pendekatan penelitian dengan kualitatif bertujuan untuk dapat memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi selama penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang didapat secara tepat dan cepat. Penelitian ini menghasilkan tentang Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di Yogyakarta).

Tabel 1
Data Primer penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Ukuran penyimpanan data yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar	Lembaga Data	Wawancara
2	Kecepatan dalam memproses data mulai dari data <i>batch</i> hingga <i>real time</i>	Dinas kesehatan dan Lembaga Data	Wawancara
3	Macam atau tipe data yang dapat diproses yang bersifat terstruktur ataupun tidak terstruktur	Lembaga Data	Wawancara
4	Data struktural dan Unstruktural	Lembaga Data	Wawancara
5	Keterbukaan informasi dalam memberikan pelayanan dan kemudahan mengakses data secara mandiri	Lembaga Data dan Dinas Kesehatan	Wawancara
6	Persiapan pelaksanaan dan evaluasi dari pelaksanaan	Lembaga Data	Wawancara
7	Hasil yang dicapai dalam memberikan data untuk mendukung pelayanan	Lembaga Data	Wawancara

Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau pelaku yang menjadi subjek dalam penelitian ini seperti melalui hasil wawancara yang dibuat yaitu tentang Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di Yogyakarta).

Tabel 2**Data Sekunder Penelitian**

No	Nama Data	Sumber Data
1	Laporan laporan dari lembaga skema kerja	Lembaga data (Dinas Keminfo) dan Dinas Kesehatan
2	Proses pengumpulan data	Lembaga data (Dinas Keminfo)

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Dalam hal ini data-data yang berkaitan tentang Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di Yogyakarta).

Tabel 3**Wawancara Narasumber**

No	Nama	Jabatan
1	Beni Sulistian S.TI	Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
2	Dian S.Pd.,MM	Sekretariat Dinas Keminfo Kota Yogyakarta (Lembaga penyedia data)

Wawancara merupakan pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan detail. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Yogyakarta).

Berikut subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini yaitu Dinas Kesehatan terkait program pelayanan BPJS Kota Yogyakarta. Tujuan wawancara kepada instansi tersebut untuk mengetahui Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di kota Yogyakarta di era Era Disrupsi

Tabel 4
Data Dokumentasi

No	Nama Dokumen	Sumber Dokumen
1	Laporan laporan dari lembaga skema kerja	Lembaga data dan Dinas Kesehatan
2	Proses pengumpulan data	Lembaga data (Dinas Keminfo)

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2013:274). Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data dalam menyediakan jasa Pelayanan Publik di Yogyakarta).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era disruption dan Revolusi Industri 4.0 sesungguhnya telah dirasakan dengan meningkatnya konektivitas dan interaksi antara manusia, mesin, serta sumber daya lainnya. Hal ini akan menjadi faktor penentu perubahan besar yang terjadi dalam proses usaha (*business process*) terkait dengan penyediaan jasa atau layanan jasa konsultasi di masa mendatang. Dampak kemajuan teknologi informasi yang sangat besar, saat ini sesungguhnya telah dirasakan era *disruption* dan industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin *konvergen* melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Hal ini akan menjadi faktor penentu perubahan besar yang terjadi dalam proses usaha (*business process*) terkait dengan penyediaan jasa atau layanan jasa konsultasi di masa mendatang. Untuk mengantisipasi era revolusi industri 4.0 ini pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat terobosan tepat dengan meluncurkan aplikasi *Jogja Smart Service* untuk pelayanan kesehatan yang berupa info Kamar untuk rawat Inap di RSUD Jogja sedangkan

instansi/dinas lainnya menggunakan *Jogja Smart Service* hanya sebagai wadah untuk pelayanan masyarakat secara mandiri

Skema Kerja Pengelola Data

- **Kapasitas data**

Dari kapasitas data yang digunakan oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta sudah sesuai dalam kategori Big data meskipun dalam pelaksanaan dalam penggunaan data masih sedikit data yang digunakan dan sering terjadi trouble ketika memasukkan data, pelemahan server dan daya akses yang menurun karena hal ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan entri data yang dialami oleh RSUD Kota Yogyakarta serta kesalahan input atau pengeditan yang dilakukan oleh petugas. Penggunaan big data yang sering trouble dan pelemahan jaringan pada sistem sering menghambat RSUD Kota Yogyakarta dalam mengentri pesanan kamar yang dipesan oleh pasien dan juga mengupload dokumen pasien yang dibutuhkan pada sistem. maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pada layanan penggunaan big data besar data yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan dalam hal ini RSUD Kota Yogyakarta masih belum bisa menambah data selaian untuk pengecekan ruangan rawat inap di RSUD Kota Yogyakarta.

- **Kecepatan data**

Pada kecepatan data yang digunakan oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta sudah mencukupi dan menunjang untuk kebutuhan pelayanan publik di Dinas Kesehatan meskipun dalam pelaksanaan sering terjadi tidak ada koneksi, pelemahan sistem baik itu dari server ke klient dan daya akses yang tiba-tiba menurun karena hal ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan layanan pada program JSS yang dialami oleh RSUD Kota Yogyakarta akan kebutuhan masyarakat yang mau rawat inap serta yang berbenturan dengan akses masyarakat yang ingin mengetahui info harga. Penggunaan big data yang sering trouble dan pelemahan

jaringan pada sistem sering menghambat RSUD Kota Yogyakarta dalam mengentri pesanan kamar yang dipesan oleh pasien dan juga mengupload dokumen pasien yang dibutuhkan pada sistem. maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pada kecepatan layanan penggunaan big data besar data yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan masih kurang. Dalam hal ini RSUD Kota Yogyakarta sudah besar tetapi masih ada ditemukan terjadinya tidak ada koneksi , pelemahan sistem baik itu dari server ke klient dan daya akses yang tiba-tiba menurun.

- **Keragaman data**

Gambar 1

Layanan info kamar di RSUD Kota Yogyakarta

jss.jogjakota.go.id



Harga Bahan Pokok
Informasi Daftar Harga Bahan Pokok Berdasarkan Survey Harga Pasar



Info Kamar RSUD Jogja
Informasi Ketersediaan Ruang Rawat Rumah Sakit Umum Daerah Jogja (Wirosaban)



Informasi Perencanaan
Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta

Berdasarkan gambar di atas tersebut sudah bagus dan memiliki tampilan yang baik untuk dapat dinikmati oleh masyarakat, masyarakat dapat melihat info kamar dengan cara menggunakan jaminan program tersebut dengan tanpa perlu datang ke RSUD secara langsung. Hal ini sangat membantu masyarakat yang mungkin memiliki wilayah yang jauh dari RSUD jogja dengan hanya mengunjungi web yang tersedia.

Walaupun pada layanan tersebut data yang terkait dengan pelayanan kesehatan bagi Dinas Kesehatan masih sangat lah minim atau masih kurang beragam maka ini menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan agar mampu mengelola program JSS ini dengan baik dan dapat dilihat juga layanan pada program JSS tidak hanya mengenai layanan kesehatan saja tetapi ada lebih dari belasan layanan, namun pada layanan kesehatan masih sangatlah kurang. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya keragaman data di Dinas Kesehatan, hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan dalam menggunakan big data hanya sebatas untuk pelayanan kesehatan yang berupa info Kamar untuk rawat Inap di RSUD Jogja.

Politik Kebijakan

Dapat kita ketahui bahwa tujuan dari pembuatan JSS ini dalam rangka untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat sudah sangat efektif dan dinilai berhasil, dikarenakan dengan jumlah pengunjung yang ada. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang ada namun hanya saja akan ada perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal perbaikan sistem Big Data yang ada dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta agar kedepannya tidak hanya diakses untuk mengecek ruang yang ada di layanan JSS RSUD Kota Yogyakarta.

Kebijakan penggunaan Big data pada *Jogja Smart Service* cukup menarik minat masyarakat untuk memakainya sehingga mencapai 608.161 pengunjung (<https://www.jogjakota.go.id/index.php/pages/aplikasi-jogja-smart-service>). Kelebihan pada

aplikasi JSS yaitu bisa mempermudah agar pekerjaan tersebut tidak memakan waktu yang terlalu banyak, khalayak luas tidak harus datang langsung ke kelurahan dan kecamatan cukup dengan mengakses aplikasi *jogja smart service* dan melengkapi data dengan mengisinya dengan lengkap dan benar kemudian tinggal menunggu verifikasi data yang di urusnya.

Kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menerapkan penggunaan Big data yaitu untuk menjadikan Kota Yogyakarta sebagai *Smart City*. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta ketika menerapkan sebuah implementasi kepada *E-government* dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 yang berupa tentang peta pengembangan *E-government* di ruang lingkup Kota Yogyakarta. Pada peraturan tersebut berisikan bahwa perencanaan yang dilakukan Pemerintah Yogyakarta meliputi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan
2. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pada sistem informasi
3. Integrasi data dan pengembangan aplikasi
4. Data warehouse/Big data
5. Kebijakan untuk menatap Kota Yogyakarta sebagai Kota Smart City.

Sedangkan pelayanan Dinas Kesehatan Yogyakarta hanya sebatas pelayanan kamar, hal ini disebabkan bahwa program penggunaan Big data yang dicanangkan pemerintah Kota Yogyakarta tergolong baru dan didukung kurangnya sosialisasi kepada instansi pemerintah yang ada di bawa sehingga untuk menerapkan atau menambahkan menu lain yang bersifat kompleks membutuhkan Sumber Daya Manusia yang memadai serta pelayanan lainnya yang bersifat teknis harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Misalnya kenapa tidak menambahkan menu hasil laboratorium, karena pengambilan sampel pada suatu tempat diperlukan waktu untuk mengirimkan sampel tersebut ketempat

pengolahan lalu pengolahannya tersebut juga membutuhkan waktu yang cukup dan juga

Tentunya memerlukan Sumber Daya Manusia yang banyak yang harus bisa melayani dengan cepat untuk mendapatkan hasil dari pengolahan sampel tersebut, sehingga dirasa bahwa kinerja tersebut kurang efektif untuk dimasukkan di awal pada aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS). Maka dapat disimpulkan selain layanan pengecekan ruangan kamar di RSUD masih akan ada lagi layanan yang akan di masukan ke program JSS. Selain itu kebijakan pada pemerintah Kota Yogyakarta yaitu untuk menerapkan *Jogja Smart City* yang sesuai dengan peraturan Walikota No 15 Tahun 2015. Dan dari hasil berapa banyak yang menikmati layanan JSS pada web yaitu sekitar 608,161 pengunjung.

Skema Kerja Lembaga data

- **Jenis data**

Data terstruktur biasanya disimpan dengan skema yang terdefinisi sehingga mudah untuk dilakukan analisa dan diintegrasikan dengan data terstruktur lainnya. Berbeda dengan data tidak terstruktur, yang secara alami susah untuk dilakukan dianalisa maupun diintegrasikan dengan sumber data lain. Data terstruktur yang ada pada penjelasan di atas berperan dalam membantu suatu instansi untuk pengambilan suatu keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan integrasi data terstruktur bisa menambah nilai yang signifikan serta kebenaran yang sejati bagi perusahaan/organisasi itu sendiri. Kualitas dari keputusan yang strategis dan taktis ini terletak pada kualitas masukan informasi tersebut. Sehingga sangatlah penting untuk menganalisa kualitas informasi sebaik mungkin dalam rentang waktu yang terbatas. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang dipakai oleh Dinas Kesehatan Kota Jogjakarta merupakan data yang tergolong terstruktur hal ini disebabkan bahwa pengelolaan dan data yang dipakai bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

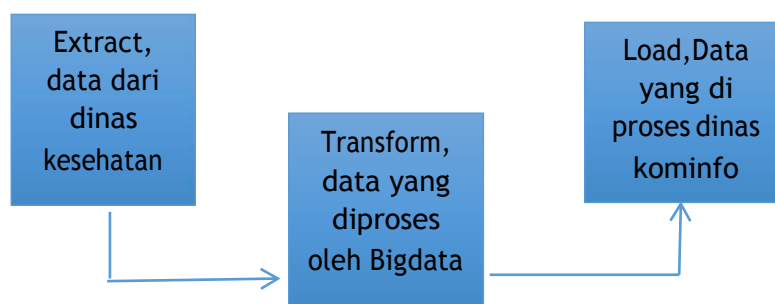
- **Tujuan**

Tujuan dengan penggunaan big data yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta yaitu untuk mempermudah penginputan data terkait kebutuhan rawat inap masyarakat Kota Yogyakarta selain itu juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta kepada masyarakat, hal ini sesuai dengan misi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah mensejahterahkan dan memperdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penggunaan big data yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta adalah untuk mempermudah penginputan data akan kebutuhan rawat inap dan kebutuhan lainnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta selain itu juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan yang dilakukan oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta kepada masyarakat.

- **Mekanisme ETL**

Mekanisme ETL dalam pengolahan big data dinas kesehatan menuju dinas kominfo sudah maksimal. data yang dikumpulkan sudah dapat di proses menjadi infomarsi yang dapat dinikmati oleh masyarakat melalui layanan JSS (*Jogja Smart Service*), data sudah maksimal hanya saja data yang diberikan tidak banyak hanya pelayanan terkait layanan *check room* RSUD Yogyakarta. Dari proses mekanisme tersebut

Bagan 1 Mekanisme Extract, Transform dan Load (ETL)



Dari Bagan diatas menjelaskan bagaimana proses mekanisme ETL yang ada pada dinas keminfo untuk dijadikan layanan pada masyarakat, berikut penjelasannya yaitu;

1. Extract yaitu proses pemilihan dan pengambilan data dari dinas kesehatan yang sebelumnya data sudah dipilah sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan atau layanan yang ingin diterbitkan .

2. Transform yaitu data yang telah diambil pada proses pemilihan di dinas kesehatan kemudian akan diubah data dari bentuk asli seperti dokumen menjadi data sesuai kebutuhan warehouse atau layanan yang diinginkan.

3. Load yaitu proses terakhir yang di proses oleh dinas kominfo untuk diterbitkan ke layanan *Jogja Smart Service (JSS)* agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa skema/mekanisme kerja dalam penggunaan big data adalah 1) melakukan integritas data dengan cara ETL (*Extract Transform and Load*), 2 yaitu memmanage data, dan 3) menganalisis data yang akan di terbitkan untuk pelayanan masyarakat.

- **Hambatan**

Terjadinya hambatan pada pelaksanaan Big data pada dikarenakan kurangnya ketersediaan data, standarisasi data, privasi data, kompetensi SDM dan infrastruktru penunjang pelaksanaan penggunaan Big data. Selain itu hambatan dalam mekanisme penggunaan big data, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yaitu kurangnya Dinas Kesehatan dalam memberikan data untuk diaplikasikan ke *JSS (jogja smart service)* yang dikelola oleh dinas kominfo, karna beberapa data tidak semua bisa diberikan kepada dinas kesehatan ke dinas keminfo kota yogyakarta. Serta kurangnya ketersediaan data, standarisai data, privasi data, kompetensi SDM dan infrastruktur penunjang.

- **Output**

Tabel 5**Output Big data pada program JSS (Jogja Smart Service)**

No	Jenis Layanan	Sasaran	Output
1	Jogja smart service (JSS)	Untuk memaksimalkan penggunaan bigdata pada prrogram JSS	Output yang didapatkan tidak sesuai dengan sasaran yang ada, dikarenakan masih sedikitnya layanan yang diberikan pada program JSS

Pada hasil tabel di atas output yang dihasilkan pada program JSS (*Jogja Smart Service*) masih kurang maksimal, ada beberapa data yang bisa dimaksimalkan untuk membuat layanan menjadi lebih baik lagi, seperti layanan pendaftaran pelayanan rawat jalan di RSUD kota Yogyakarta yang dilayani secara online, pengecekan kesehatan, konsultasi dokter dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa output atau hasil yang didapatkan dari kerjasama dengan lembaga data terkait pelaksanaan big data untuk pelayanan publik yaitu :

- 1) membuat pelayanan menjadi lebih baik,
- 2) membuat lembaga data yaitu dinas kominfo memaksimalkan penggunaan big data pada JSS (*Jogja Smart Service*).
- 3) membuat tambahan layanan pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

Dengan tiga kesimpulan tersebut maka pelayanan-pelayanan terkait pemanfaatan penggunaan Big Data di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Dinas Kominfo Kota Yogyakarta akan teralisasi dan membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif dan maksimal bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

D. KESIMPULAN

Besar/kapasitas data yang digunakan oleh Dinas Kesehatan yaitu sebesar 120 TB Kecepatan data yang di dapat oleh Dinas Kesehatan sudah mencukupi dan menunjang untuk kebutuhan pelayanan publik di Dinas Kesehatan. Namun tidak terdapat adanya keragaman data di Dinas Kesehatan, hal ini disebabkan karena Dinas Kesehatan dalam menggunakan big data hanya sebatas untuk pelayanan kesehatan yang berupa info Kamar untuk rawat Inap di RSUD Jogja. Kebijakan yang ada terkait penggunaan Big data ada pada peraturan Walikota No 15 Tahun 2015, dalam perumusan pelayanan-pelayanan yang lain Dinas Kesehatan sudah terealisasi namun kurangnya sosialisasi kepada instansi pemerintah yang ada di bawa sehingga untuk menerapkan atau menambahkan menu lain yang bersifat kompleks membutuhkan sumberdaya yang memadai

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan kelimabelas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, Fahmi. 2018. Implementasi Big Data Bantu Muluskan Pelaksanaan JKN, diakses dari <https://www.beritasatu.com/kesehatan-aktualitas/521015-implementasi-big-data-bantu-muluskan-pelaksanaan-jkn.html>
- Kairupan, Josef Kurniawan. 2015. *Jurnal Adiministrasi Publik* Vol 4, No 35 (2015) Universitas Samratulangi Manado.
- Kementerian BPN/Bappenas. 2017. Siaran Pers Implementasi Big Data Untuk Perumusan Kebijakan Publik https://www.bappenas.go.id/files/5714/8767/0177/Siaran_Pers_-_Implementasi_Big_Data_untuk_Perumusan_Kebijakan_Publik.pdf.
- Lestari, Adinda Larasati. 2015. Memprediksi *Organizational Citizenship Behavior* Berdasarkan Persepsi Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan *Quality Of Worklife* Pada Pegawai Negeri Sipil. *Skripsi* Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2015 Tentang *E-government*.

Tribun Jogja. 2017. Hasil Survei Ombudsman Soal Standar Pelayanan Publik, <http://jogja.tribunnews.com/2017/12/08/hasil-survei-ombudsman-soal-standar-pelayanan-publik-pemda-diy-belum-dapat-kepatuhan-tinggi>